

DISERTASI
IMPLIKASI HUKUM BENCANA BANJIR TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM
KERANGKA SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ERLIANTI
2141214320011



PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Disertasi: Implikasi Hukum Bencana Banjir Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Ketangguhan Sustainable Development

Nama : Erlianti
NIM 2341214320011

Disetujui,

Promotor



Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Co Promotor 1



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Co Promotor 2



Dr. Achmad Fzisal, S.H., M.H.

Koordinator Program Studi Hukum Program Doktor



Dr. Djoni Sumantri Gani, S.H., M.Hum.

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Disertasi: Implikasi Hukum Bencana Banjir Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Kerangka Sustainable Development

Nama : Erlianti

NIM 2341214320011

Disetujui,

Promotor

Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Co Promotor 1

Co Promotor 2

Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

Koordinator Program Studi Hukum Program Doktor

Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan pemilik alam semesta ini karena atas rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyusun Disertasi pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Lambung Mangkurat ini dengan judul “Implikasi Hukum Bencana Banjir terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Bidang Lingkungan Hidup dalam Kerangka Sustainable Development”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, penulis mengharapkan jika ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Disertasi ini. Diselesaikannya Disertasi ini tidak terlepas juga dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. selaku Promotor yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini
2. Ibu Dr. Erlina, S.H., M.H. selaku Co. Promotor yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, revisi, dan catatan-catatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sekaligus Co. Promotor yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, revisi, dan catatan- catatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
4. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
5. Seluruh Dosen pengasuh matakuliah di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
6. Segenap Staf Akademik, kemahasiswaan, keuangan Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
7. Keluarga yang selalu memberikan semangat, doa serta motivasi yang tiada henti sehingga dapat penulis menyelesaikan penelitian ini.
8. Teman-teman penulis di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM angkatan I dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis.

Akhir kata, semoga Disertasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Banjarmasin, 1 Agustus 2025
Penulis

Erlianti

RINGKASAN

Oleh:

Erlianti¹, M. Hadin Muhjad², Erlina³, Achmad Faisal⁴

**Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas
Lambung Mangkurat**

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari bencana banjir terhadap perlindungan hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Fokus utama penelitian adalah menjawab rumusan masalah mengenai: pertama, apakah bencana banjir dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia di bidang lingkungan; kedua, apakah bencana banjir merupakan bagian dari kerusakan lingkungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan apakah warga masyarakat mempunyai hak gugat sebagai korban banjir; serta ketiga, bagaimana model perlindungan hukum yang dapat diterapkan untuk melindungi warga masyarakat korban banjir dalam kerangka konsep pembangunan berkelanjutan.

Melalui pendekatan penelitian normatif dengan analisis perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini berupaya menjawab rumusan masalah dengan menelaah dasar hukum, tanggung jawab pemerintah, serta hak-hak warga yang terdampak bencana banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada bukti bahwa pemerintah dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika tidak menjalankan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan dan pencegahan bencana banjir sehingga melanggar hak asasi manusia. Selain itu, korban banjir memiliki hak untuk menggugat pemerintah sebagai bentuk perlindungan atas hak lingkungan yang sehat dan aman. Penelitian ini juga merumuskan model perlindungan hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan dalam pengelolaan risiko bencana dan perlindungan hak-hak korban.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan perlindungan hukum hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup serta mendukung adanya kebijakan yang berorientasi pada pengelolaan risiko bencana banjir secara berkelanjutan.

SUMMARY

By:

Erlianti⁵, M. Hadin Muhjad⁶, Erlina⁷, Achmad Faisal⁸

Doctoral Program in Law Study Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University

This study examines the legal implications of flood disasters on the protection of human rights in the field of environmental law within the framework of sustainable development. The primary focus is to answer three main questions: first, whether flood disasters constitute unlawful acts by the government that breach human rights in the environmental sector; second, whether flood disasters are part of environmental damage for which the government holds responsibility and whether affected communities have the right to claim compensation as flood victims; and third, to identify legal protection models that can be applied to safeguard affected communities within the concept of sustainable development.

Using normative legal research by analyzing relevant legislation, conceptual frameworks, and comparative law, this study attempts to answer the research questions through a comprehensive review of legal obligations, government responsibility, and the rights of people impacted by flood disasters. The findings reveal that the government may be considered to have committed unlawful acts if it fails to manage the environment and prevent floods, thus violating human rights. Moreover, flood victims have the right to file claims against the government as a form of legal protection for their rights to a safe and healthy environment. The study also proposes a legal protection model that integrates sustainable development principles as the basis for disaster risk management and victim protection.

This research is expected to make theoretical and practical contributions to the development of legal protection for human rights in the environmental field and to support policymaking focused on sustainable flood disaster risk management.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implikasi hukum bencana banjir terhadap perlindungan hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Fokus utama penelitian adalah untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: pertama, apakah bencana banjir dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang menjadi pelanggaran hak asasi manusia di bidang lingkungan; kedua, apakah bencana banjir merupakan bagian dari kerusakan lingkungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan apakah warga masyarakat memiliki hak gugat sebagai korban banjir; dan ketiga, bagaimana model perlindungan hukum yang efektif bagi warga masyarakat korban banjir dalam kerangka konsep pembangunan berkelanjutan

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Penelitian ini menelaah regulasi, konsep hukum, serta implementasi kebijakan terkait penanggulangan bencana banjir dan perlindungan hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atas pengelolaan risiko banjir, dan kelalaian dalam hal ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan hak masyarakat. Selain itu, korban banjir memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah dalam memastikan perlindungan hak atas lingkungan yang sehat dan aman. Penelitian ini juga merumuskan model perlindungan hukum yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan dalam pengelolaan bencana dan perlindungan hak korban.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam penguatan perlindungan hukum hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk pengelolaan risiko bencana banjir yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Banjir, Hak Asasi Manusia, Lingkungan.

ABSTRACT

This study examines the legal implications of flood disasters on the protection of human rights in the field of environmental law within the framework of sustainable development. The primary focus of the research is to answer three main questions: first, whether flood disasters can be categorized as unlawful acts by the government violating human rights in the environmental sector; second, whether flood disasters constitute environmental damage for which the government is responsible and whether affected communities have the right to claim damages; and third, what legal protection models exist or can be developed to safeguard community members affected by floods within the sustainable development concept.

The research method employed is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. This study analyzes relevant regulations, legal concepts, and policy implementations regarding flood disaster management and human rights protection in environmental law. The findings reveal that the government bears legal responsibility for flood risk management, and negligence in this regard may be deemed unlawful acts that infringe upon community rights. Furthermore, flood victims have the legal right to file claims against the government to ensure protection of their rights to a safe and healthy environment. The research also proposes a legal protection model that integrates sustainable development principles as a foundation for managing disasters and protecting victims' rights.

This research is expected to provide both academic and practical contributions in strengthening the legal protection of human rights in environmental law and recommending relevant policies for sustainable flood risk management.

Keywords: *Legal Implications, Flood, Human Rights, Environmental.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian.....	12
D. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kerangka Teoritik	17
1. <i>Grand Theory</i> : Tori Perlindungan Hukum.....	17
2. <i>Middle Range Theory</i> : Teori Keadilan.....	20
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Kepastian Hukum	28
B. Kerangka Konseptual.....	32
C. Bagan Kerangka Pikir.....	54
D. Definisi Operasional/Konseptual.....	56

BAB III : METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Sifat Penelitian.....	57
C. Tipe Penelitian	58
D. Pendekatan Penelitian.....	59
E. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	61
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	64
G. Analisis Bahan Hukum.....	64
H. Sistematika Penulisan	66
BAB IV : HASUL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Bencana Banjir Merupakan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Sebagai Pelanggaran HAM Lingkungan	68
1. Bencana Banjir Akibat Perbuatan Manusia	68
2. Banjir adalah Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah.....	76
3. Banjir Dalam Rangka HAM Lingkungan.....	108
B. Bencana Banjir Yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Sehingga Bagi Warga Masyarakat Mempunyai Hak Gugat Sebagai Korban Banjir	145
1. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Atas Bencana Banjir.....	145
2. Posisi Masyarakat Dalam Kerangka Tanggungjawab Pemerintah ..	178
3. Prosedur Menuntut Hak Bagi Korban Banjir	194
C. Model Perlindungan Hukum Warga Masyarakat Akibat Korban Banjir Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan	239
1. Perlindungan Hukum Warga Masyarakat Dari Kerugian Akibat Banjir	239
2. Pembangunan Berkelanjutan Dalam Kaitan Bencana Banjir	269
3. Studi Perbandingan Negara Lain Yang Berhasil Mengatasi Banjir.	293
BAB V : PENUTUP	314
A. Kesimpulan.....	314

B. Saran	315
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA